



DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



ptunserang ptun serang <https://ptun-serang.go.id> Ptun Serang

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 Nomor : 185 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/II/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA

PIHAK PERTAMA,
KETUA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.



Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Nomor : 185 /KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/I/2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	90
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Serang, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUAPIHAK PERTAMA,
KETUA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.



Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Nomor : 185 /KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/I/2026

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp13.792.649.000,-	Layanan Perkantoran	
		- Gaji dan Tunjangan	Rp 11.406.161.000,-
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.351.048.000,-
		Layanan Sarana Internal	
		- Belanja Modal	Rp 20.000.000,-
		Layanan Umum	
		- Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp 15.140.000,-
		- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp76.313.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
		- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 10.000.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.908.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 405.000,-
		- Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	Rp 32.000.000,-

Serang, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA

PIHAK PERTAMA,
KETUA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.



Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.



**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR 317/KPTUN.W2-TUN3/SK.RA1.10/II/2026

TENTANG

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2026
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di Tahun 2026 untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan janji/kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 32 tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Tahun 2025-2029;




6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
12. Petikan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Serang TA 2026 Nomor SP DIPA-005.01.2/689313/2026 dan SP DIPA-005.2.690202/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2026 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja, Lampiran Perjanjian Kinerja (Sasaran, Indikator, dan Target), serta Rincian Anggaran;
- KETIGA : Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Aksi, monitoring, evaluasi, dan penilaian capaian kinerja akhir tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Serang
 Pada tanggal : 25 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
 KETUA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
 HARI HARTOMO SETYO NUGROHO



**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	90
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3



Ditandatangani secara elektronik oleh
 KETUA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
 HARI HARTOMO SETYO NUGROHO



RINCIAN ANGGARAN TAHUN 2026

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp13.792.649.000,-	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan - Pemeliharaan Kantor	Rp 11.406.161.000,- Rp 2.351.048.000,-
		Layanan Sarana Internal - Belanja Modal	Rp 20.000.000,-
		Layanan Umum - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 15.140.0000,- Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp76.313.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara - Pelaksanaan Pengamanan Sidang - Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) - Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	Rp 10.000.000,- Rp 33.908.000,- Rp 405.000,- Rp 32.000.000,-



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

